

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)  
PERAN PERUM PERHUTANI BKPH TAPEN  
KPH MOJOKERTO**



Oleh :

1. **Krisanti Dwi Ningrum (1761251)**
2. **Farida Putri Diana Sari (1761252)**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
STIE PGRI DEWANTARA JOMBANG  
2021**

**LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM)  
PERAN PERUM PERHUTANI BKPH TAPEN  
KPH MOJOKERTO**



Oleh :

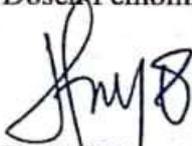
Jombang,



Mengetahui,  
Pendamping Lapangan,

Iwan Rismanto

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,



Deni Widyo P. SE., MM

Mengesahkan,

Prodi Manajemen



Erbinati P. MSM

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat hidayah dan taufiqnya kami mampu menyelesaikan penyusunan laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) kelompok ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan kuliah jenjang strata jenjang 1 program studi Manajemen, laporan ini diharapkan bisa memberi pengalaman dan menambah kemampuan mahasiswa untuk dapat terjun ke dunia kerja.

Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, serta masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Mudah-mudahan laporan ini dapat mendorong kita untuk lebih giat dalam proses menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Amin yarobbal'alam...

Jombang, 1 April 2021

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang.....	1
1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang.....	1
1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang.....	2
1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang.....	2
1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang.....	2
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG (KKM).....</b>	<b>3</b>
2.1 Profil Perusahaan Perum Perhutani.....	3
2.2 Sejarah Perusahaan.....	4
2.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	9
2.4 Tugas Dan Fungsi.....	9
2.5 Struktur Organisasi Perusahaan.....	11
<b>BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG.....</b>	<b>12</b>
3.1 Pelaksanaan Kerja.....	12
3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang.....	12

3.3	Usulan Pemecahan Masalah/Solusi .....	13
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>14</b>
4.1	Simpulan.....	14
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>15</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Struktur Organisasi.....	11
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang**

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Dalam mengelola perusahaan, Perhutani menghargai seluruh aturan mandatory dan voluntary guna mencapai Visi dan Misi perusahaan. Perhutani optimis akan keberhasilan masa depan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan berdasarkan kondisi hutan yang ada, kekuatan Visi yang ingin dicapai dan konsistensi penarapan standar internasional pengelolaan hutan sebagai pendukung bisnis yang berkelanjutan.

### **1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang**

1. Untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan sebagai aplikasi dari teori pembelajaran yang didapatkan dibangku kuliah.
2. Dengan adanya Kuliah Kerja Magang ini, diharapkan dapat mengembangkan kreatifitas kemandirian mental di dunia kerja.
3. Meningkatkan softskill mahasiswa (kemampuan dalam berkomunikasi, meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki sikap dan perilaku)
4. Diperlukan keselarasan antara system pendidikan tinggi dan dunia kerja.
5. Syarat kelulusan kuliah Manajemen di STIE PGRI Dewantara Jombang.

### **1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang**

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang dunia kerja
2. Mahasiswa memiliki keterampilan berkomunikasi dan memiliki rasa percaya diri dalam bersikap dan perilaku

### **1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang**

Kuliah Kerja Magang (KKM) ini dilaksanakan pada :

Nama tempat Kuliah Kerja Magang : Perum Perhutani KPH Mojokerto  
BKPH Tapen

Alamat Perusahaan / Instansi : Jalan Raya Brantas No.83, Tapen-  
Kudu, Kabupaten Jombang

No. Telp : -

### **1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang**

Kuliah Kerja Magang ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2021 sampai 31 April 2021. Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang ini dilaksanakan sesuai jam kerja operasional perusahaan, yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH**  
**KERJA MAGANG (KKM)**

**2.1 Profil Perusahaan Perum Perhutani**

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Dalam mengelola perusahaan, Perhutani menghargai seluruh aturan mandatory dan voluntary guna mencapai Visi dan Misi perusahaan. Perhutani optimis akan keberhasilan masa depan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan berdasarkan kondisi hutan yang ada, kekuatan Visi yang ingin dicapai dan konsistensi penerapan standar internasional pengelolaan hutan sebagai pendukung bisnis yang berkelanjutan.

BKPH Tapen merupakan satuan kerja dibawa Perusahaan Umum Kehutanan Negara Perum Perhutani KPH Mojokerto, masuk wilayah administratif Kabupaten Jombang yang meliputi 3 kecamatan:

1. Kecamatan Kabuh
2. Kecamatan Kudu
3. Kecamatan Ngusikan

BKPH Tapen memiliki luas : 3.909,5 ha, dibagi dalam 4(Empat) wilayah resort yaitu :

- ▶ RPH Sempal            Luas : 935,7ha
- ▶ RPH Peleman        Luas : 1.033,7 ha
- ▶ RPH Katemas        Luas : 961,7 ha
- ▶ RPH Made            Luas : 978,4 ha

BKPH Tapen berbatasan dengan :

- ▶ Utara : BKPH Kambangan
- ▶ Timur : BKPH Kemlagi

- ▶ Selatan: KPH Jombang
- ▶ Barat : KPH Jombang

## 2.2 Sejarah Perusahaan

- Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara modern-institusional dimulai tahun 1897 dengan dikeluarkannya “Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera”, Staatsblad nomor 61 (disingkat “Bosreglement”) selain itu terbit pula “Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera” (disingkat “Dienst Reglement”) yang menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan, dimana dibentuk Jawatan Kehutanan dengan Gouvernement Besluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Hutan-hutan Jati di Jawa mulai diurus dengan baik, dengan dimulainya afbakening (pemancangan), pengukuran, pemetaan dan tata hutan.
- Pada tahun 1913 penetapan “Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera”, Staatsblad nomor 495, yang mengatur tentang “eksploitasi sendiri (eigen beheer) atau penebangan borong (door particuliere aannemer)”.
- Tahun 1927 terbit Bosch\_Ordonnantie, termuat dalam Staatsblad Tahun 1927 nomor 221 dan peraturan pelaksanaannya berupa Bosch\_Verordening 1932, nama lengkap dokumen: “Bepalingen met Betrekking Tot’s Lands Boschbeheer op Java en Madoera” yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan (den dienst van het Boschwezen).
- Tahun 1930 pengelolaan hutan Jati diserahkan kepada badan “Djatibedrijf” atau perusahaan hutan Jati dari Pemerintah (Jawatan Kehutanan). Perusahaan hutan Jati tersebut tidak berdiri lama, karena pada tahun 1938 oleh Directeur van Financien (Direktur Keuangan Pemerintahan Hindia Belanda) dinyatakan bahwa perusahaan yang bertujuan komersial sebulat-bulatnya harus dihentikan, karena alasan-alasan berikut:

1. Pemerintah, yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, tidak hanya berkewajiban memproduksi dan menjadikan uang dari hasil kayu Jati saja, tetapi Jawatan Kehutanan bertugas pula memelihara hutan-hutan yang tidak langsung memberi keuntungan kepada Pemerintah. Yang dimaksud dengan hutan-hutan di atas, ialah hutan-hutan lindung, yang memakan amat banyak biaya sedang hasil langsung tidak ada atau sangat sedikit.
  2. Perusahaan hutan Jati sebagai badan swasta atau perusahaan kayu perseorangan, menganggap hutan Jati kepunyaan Pemerintah sebagai modal yang tidak dinilai atau tidak diberi harga (sukar untuk menetapkan harga tanah dan kayu dari hutan Jati seluas 770.000 hektar), akan tetapi menggunakan hutan Jati itu sebagai obyek eksploitasi saja dan tidak mempengaruhi atau mengakibatkan kerugian suatu apapun kepada tanah dan hutan Jati milik Pemerintah yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, dipandang dari sudut hukum perusahaan, tindakan seperti di atas tidaklah benar.
- Tahun 1940 pengurusan hutan Jati dari “Djatibedrijf” dikembalikan lagi ke Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang (Dai Nippon), Jawatan Kehutanannya (i.c Boschwezen) diberi nama Ringyo Tyuoo Zimusyo (RTZ), berturut-turut organisasi tersebut dimasukkan kedalam Departemen Sangyobu (urusan ekonomi, Juni 1942 – Oktober 1943), kemudian kedalam Departemen Zoosenkyoku (perkapalan, November 1943 s/d pertengahan 1945) dan setelah itu di bawah Departemen Gunzyuseizanbu atau Departemen Produksi Kebutuhan Perang, sampai dengan tanggal 15 Agustus 1945.
  - Tahun 1945 pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda q.q. den Dienst van het Boschwezen, dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia

berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

- Tahun 1960 dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, seperti tersebut dalam Lampiran Buku I, Jilid III, Paragraf 493 dan paragraf 595, industri kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 2551). Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial. Tujuannya, agar kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30, tahun 1961, tentang ”Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)”. Pada tahun 1961 tersebut, atas dasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka masing-masing dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara, disingkat ”BPU Perhutani”, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 38, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2172.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Timur disingkat PN Perhutani Djawa Timur, termuat dalam

Lembaran Negara tahun 1961 nomor 39, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2173.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1961 didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Tengah disingkat PN Perhutani Djawa Tengah, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 40, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2174.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara. diserahkan perusahaan hutan-hutan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara, selanjutnya disingkat "Perhutani". Presiden Direktur BPU Perhutani, Anda Ganda Hidajat, pada forum Konperensi Dinas Instansi-instansi Kehutanan tanggal 4 s/d 9 November 1963 di Bogor, dalam prasarannya berjudul: "Realisasi Perhutani", pada halaman 2 menulis bahwa: "Dalam pelaksanaan UU No. 19 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP No.17 tahun 1961, sedangkan pengangkatan Direksinya yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 210/1961". PERHUTANI daerah yang telah direalisir pendiriannya adalah :

- Perhutani Djawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1961
- Perhutani Djawa Tengah pada tanggal 1 Nopember 1961
- Perhutani Kalimantan Timur pada tanggal 1 Djanuari 1962
- Perhutani Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Djanuari 1962
- Perhutani Kalimantan Tengah pada tanggal 1 April 1963

➤ Tahun 1972 pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (vide : Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972).

- Tahun 1978 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani. Dasar Hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, kemudian disempurnakan/diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003.
- Tahun 2010 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2010 dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa dan Madura oleh Perum Perhutani.
- Tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No 73 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Sejak 2 Oktober 2014 tersebut Perum Perhutani ditunjuk Pemerintah selaku pemegang saham sebagai induk Holding BUMN Kehutanan dengan anak perusahaan PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, PT Inhutani IV, PT Inhutani V. Penambahan penyertaan modal negara bagi Perum Perhutani berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara pada perusahaan PT. Inhutani I (didirikan berdasarkan PP No. 21/1972 di Kalimantan Timur), PT. Inhutani II (didirikan berdasarkan PP No.

32/1974 di Kalimantan Selatan), PT. Inhutani III (didirikan berdasarkan PP No. 31/1974 di Kalimantan Tengah), PT. Inhutani IV (didirikan berdasarkan PP No. 22/1991 di Sumatera Utara) dan PT. Inhutani V (didirikan berdasarkan PP No. 23/1991 di Sumatera Selatan).

### 2.3 Visi dan Misi Perusahaan



Visi : Menjadi perusahaan pengelola hutan, berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat



Misi : mengelola sumber daya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip good corporate governance

### 2.4 Tugas Dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Perusahaan berdasarkan Maksud dan Tujuan yang tertuang dalam Pasal 11 ayat 1-3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan Pengelolaan Hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Pengelolaan Hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

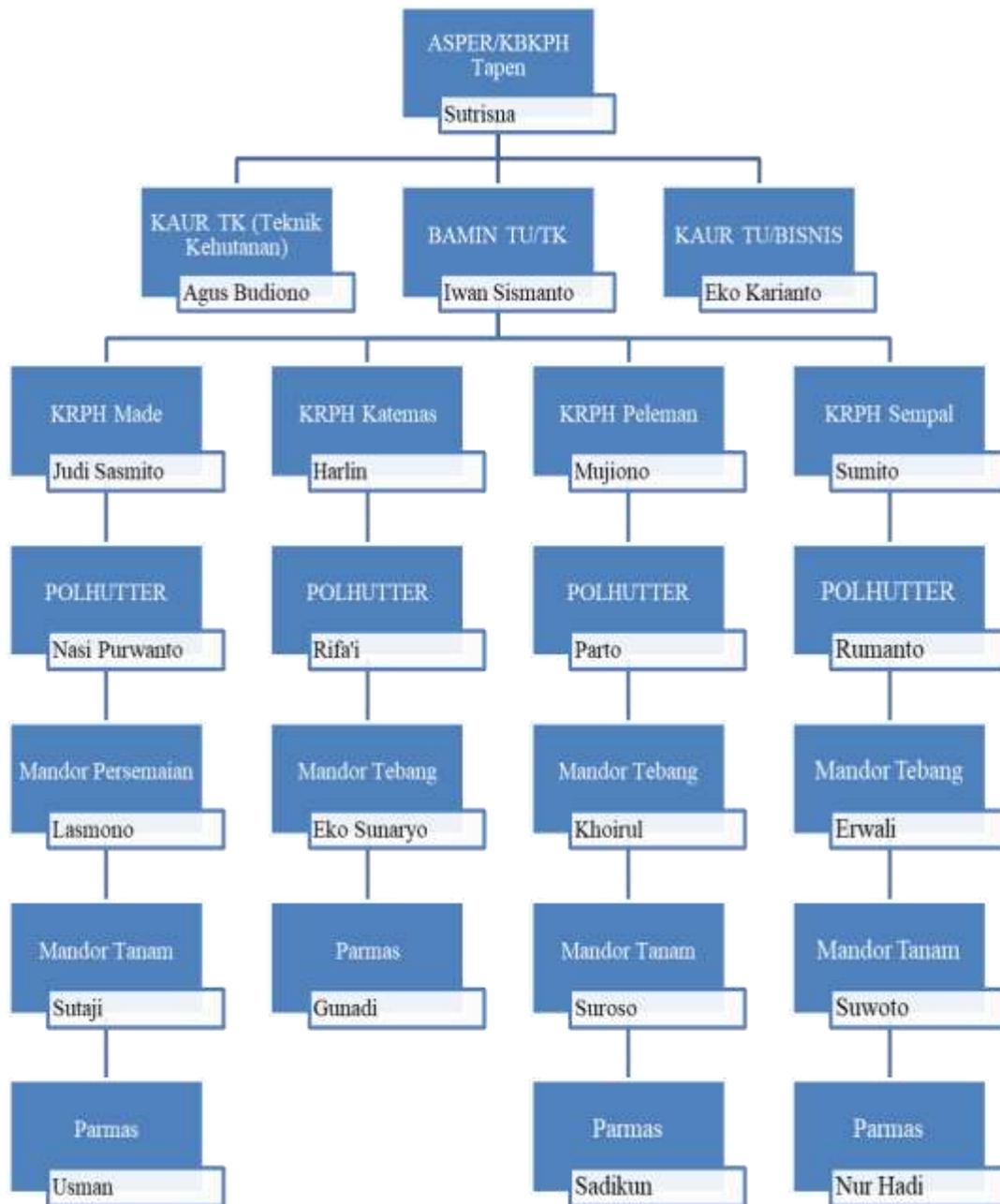
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha utama:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan
- b. Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- c. Rehabilitasi dan reklamasi
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam
- e. Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi
- f. Pendidikan dan pelatihan di bidang Kehutanan
- g. Penelitiaian dan pengembangan di bidang Kehutanan
- h. Pengembangan agroforestry
- i. Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/atau Hutan Tanaman Rakyat
- j. Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada pasal (2), Perusahaan dapat menyelenggarakan usaha lain berupa:

- a. Usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk tarding house, agroindustrial complex, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya
- b. Kegiatan usaha lain sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan

## 2.5 Struktur Organisasi Perusahaan



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG**

#### **3.1 Pelaksanaan Kerja**

Sistem kerja di Perum Perhutani KPH Mojokerto BKPH Tapen adalah sebagai berikut:

1. Hari kerja yaitu hari Senin-Jum'at
2. Jam masuk kantor pukul 07.30 - 14.00
3. Jam istirahat pukul 12.00 – 13.00

Penempatan pelaksanaan magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang yaitu pada bidang Administrasi Kantor untuk ikut membantu dalam penyelesaian data yang dibutuhkan. Pada bidang Administrasi Kantor memiliki tugas melakukan entri data, perekapan data, mengelola dokumen, mengarsip data-data dan pembuatan surat,

Mahasiswa magang ditempatkan dibagian tersebut dengan harapan bahwa mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sistematika dalam menangani persoalan administrasi perusahaan.

#### **3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang**

Berdasarkan dari pengamatan yang sudah dilakukan selama beberapa waktu, kami para mahasiswa melihat bahwasanya posisi karyawan pada perumperhutani BKPH Tapen sudah memenuhi syarat tidak terlihat adanya kekosongan posisi pada bidang. Bagian bagian yang di tempati sudah di jalankan dengan baik, mereka selalu mengadakan rapat untuk semua anggota sebelum terjun ke lapangan atau hutan. Dengan mengutamakan komunikasi yang baik mereka dapat mengerjakan tugas – tugas dengan baik

### **3.3 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi**

Berdasarkan masalah yang ada di perusahaan, Terdapat masalah pemasaran produk minyak kayu putih. Perhutani memiliki produk minyak kayu putih yang murni atau buatan perhutani sendiri tetapi pemasarannya kurang dikarenakan harganya yang menurut masyarakat terlalu mahal sehingga penjualannya hanya ditempat – tempat tertentu. Seharusnya perhutani lebih berani memasarkan produk ini ke masyarakat umum karena minyak kayu putih produk perhutani memiliki kualitas produk yang tinggi dengan kemurnian produknya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Peran Perhutani sangat penting bagi kelestarian hutan serta bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun peran perhutani yakni sebagai: (1) Regulator pada hutan lindung dan hutan produksi (2) Fasilitator pada hutan produksi dan hutan lindung (3) Berperan dalam pembagian lahan kepada masyarakat (4) Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada LMDH/LKDPH (5) Berperan dalam pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari persemaian sampai dengan agrobisnis (wisata). Memberikan aturan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung agar masyarakat sekitar hutan tidak semena-mena atau merusak dalam mengelolanya, selain itu Perum Perhutani juga memberikan pengarahan dan pembinaan dalam suatu forum kepada LMDH/LKDPH. Dalam pemberdayaan masyarakat disetiap kegiatannya mempunyai nilai intensif. Hal ini sangat menunjang untuk peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://titikdua.net/kata-pengantar-laporan-magang>

<https://perhutani.co.id>

<http://pemerintahan.umm.ac.id>

Lampiran 1

**LAPORAN KEGIATAN HARIAN**

Nama : Farida Putri Diana Sari  
NIM : 1761252  
Program Studi : Manajemen  
Tempat KKM : Perum Perhutani KPH Mojokerto BKPH Tapen  
Bagian/Bidang : Administrasi Kantor

<b>Minggu Ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
I	1 Maret 2021	• Perkenalan
	2 Maret 2021	• Input data perawatan pohon KRPH Made
	3 Maret 2021	• Input data tebangan pohon KRPH Made
	4 Maret 2021	• Input data keamanan KRPH Made
	5 Maret 2021	• Merekap data administrasi KRPH Made
	6 Maret 2021	• Libur
	7 Maret 2021	• Libur

## LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama : Krisanti Dwi Ningrum

NIM : 1761251

Program Studi : Manajemen

Tempat KKM : Perum Perhutani KPH Mojokerto BKPH Tapen

Bagian/Bidang :

<b>Minggu Ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
I	1 Maret 2021	• Perkenalan
	2 Maret 2021	• Input data perawatan pohon KRPH Made
	3 Maret 2021	• Input data tebangan pohon KRPH Made
	4 Maret 2021	• Input data keamanan KRPH Made
	5 Maret 2021	• Merekap data administrasi KRPH Made
	6 Maret 2021	• Libur
	7 Maret 2021	• Libur

## LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama : Farida Putri Diana Sari

NIM : 1761252

Program Studi : Manajemen

Tempat KKM : Perum Perhutani KPH Mojokerto BKPH Tapen

Bagian/Bidang :

<b>Minggu Ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
2	8 Maret 2021	• Input data perawatan pohon KRPB Katemas
	9 Maret 2021	• Input data tebangan pohon KRPB Katemas
	10 Maret 2021	• Input data keamanan pohon KRPB Katemas
	11 Maret 2021	• Mengarsipkan dan menyetempel surat
	12 Maret 2021	• Merekap data administrasi KRPB Made
	13 Maret 2021	• Libur
	14 Maret 2021	• Libur

## LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama : Krisanti Dwi Ningrum

NIM : 1761251

Program Studi : Manajemen

Tempat KKM : Perum Perhutani KPH Mojokerto BKPH Tapen

Bagian/Bidang :

<b>Minggu Ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
2	8 Maret 2021	• Input data perawatan pohon KRPB Katemas
	9 Maret 2021	• Input data tebangan pohon KRPB Katemas
	10 Maret 2021	• Input data keamanan pohon KRPB Katemas
	11 Maret 2021	• Mengarsipkan dan menyetempel surat
	12 Maret 2021	• Merekap data administrasi KRPB Made
	13 Maret 2021	• Libur
	14 Maret 2021	• Libur

## LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama : Farida Putri Diana Sari

NIM : 1761252

Program Studi : Manajemen

Tempat KKM : Perum Perhutani KPH Mojokerto BKPH Tapen

Bagian/Bidang :

<b>Minggu Ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
3	15 Maret 2021	• Mengelola dokumen perhutani
	16 Maret 2021	• Input data perawatan pohon KRPH Sempal
	17 Maret 2021	• Input data tebangan pohon KRPH Sempal
	18 Maret 2021	• Input data keamanan pohon KRPH Sempal
	19 Maret 2021	• Merekap data administrasi KRPH Sempal • Mengarsipkan dan menyetempel surat
	20 Maret 2021	• Libur
	21 Maret 2021	• Libur

## LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama : Krisanti Dwi Ningrum

NIM : 1761251

Program Studi : Manajemen

Tempat KKM : Perum Perhutani KPH Mojokerto BKPH Tapen

Bagian/Bidang :

<b>Minggu Ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
3	15 Maret 2021	• Mengelola dokumen perhutani
	16 Maret 2021	• Input data perawatan pohon KRPH Sempal
	17 Maret 2021	• Input data tebangan pohon KRPH Sempal
	18 Maret 2021	• Input data keamanan pohon KRPH Sempal
	19 Maret 2021	• Merekap data administrasi KRPH Sempal • Mengarsipkan dan menyetempel surat
	20 Maret 2021	• Libur
	21 Maret 2021	• Libur

## LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama : Farida Putri Diana Sari

NIM : 1761252

Program Studi : Manajemen

Tempat KKM : Perum Perhutani KPH Mojokerto BKPH Tapen

Bagian/Bidang :

<b>Minggu Ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
4	22 Maret 2021	• Membuat surat pernyataan pemilik wilayah
	23 Maret 2021	• Izin
	24 Maret 2021	• Input data perawatan pohon KRPH Peleman
	25 Maret 2021	• Input data tebangan pohon KRPH Peleman
	26 Maret 2021	• Input data keamanan pohon KRPH Peleman • Mengarsipkan dan menyetempel surat
	27 Maret 2021	• Libur
	28 Maret 2021	• Libur

## LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama : Krisanti Dwi Ningrum

NIM : 1761251

Program Studi : Manajemen

Tempat KKM : Perum Perhutani KPH Mojokerto BKPH Tapen

Bagian/Bidang :

<b>Minggu Ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
4	22 Maret 2021	• Membuat surat pernyataan pemilik wilayah
	23 Maret 2021	• Izin
	24 Maret 2021	• Input data perawatan pohon KRPB Peleman
	25 Maret 2021	• Input data tebangan pohon KRPB Peleman
	26 Maret 2021	• Input data keamanan pohon KRPB Peleman • Mengarsipkan dan menyetempel surat
	27 Maret 2021	• Libur
	28 Maret 2021	• Libur

## LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama : Farida Putri Diana Sari

NIM : 1761252

Program Studi : Manajemen

Tempat KKM : Perum Perhutani KPH Mojokerto BKPH Tapen

Bagian/Bidang :

<b>Minggu Ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
5	29 Maret 2021	• Mengelola data perhutani
	30 Maret 2021	• Merekap data • Mengarsipkan dan menyetempel surat
	31 Maret 2021	• Penutupan

## LAPORAN KEGIATAN HARIAN

Nama : Krisanti Dwi Ningrum

NIM : 1761251

Program Studi : Manajemen

Tempat KKM : Perum Perhutani KPH Mojokerto BKPH Tapen

Bagian/Bidang :

<b>Minggu Ke</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
5	29 Maret 2021	• Mengelola data perhutani
	30 Maret 2021	• Merekap data • Mengarsipkan dan menyetempel surat
	31 Maret 2021	• Penutupan

Lampiran 3

**Dokumentasi**

Kegiatan











